

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian tentang IFRS telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang persepsi akuntan terhadap konvergensi IFRS itu sendiri dapat dikatakan masih terbatas. Berikut beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan IFRS:

Kusumawardhani (2011) meneliti tentang perbedaan persepsi Akademisi (Akuntan Pendidik) dan Praktisi (Akuntan Publik) di Indonesia tentang implementasi secara penuh IFRS di Indonesia. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara Akademisi (Akuntan Pendidik) dan Praktisi (Akuntan Publik) terhadap implementasi secara penuh IFRS di Indonesia.

Nurani (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Hasil penelitiannya adalah: (1) Terdapat perbedaan persepsi mengenai pengetahuan dan pentingnya IFRS serta penggunaan IFRS dan PSAK antara mahasiswa akuntansi yang belum menempuh mata kuliah akuntansi internasional dan telah menempuh mata kuliah akuntansi internasional, (2) Tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai peran IFRS dan PSAK dalam pemakaian standar akuntansi dan juga konvergensi IFRS di Indonesia antara mahasiswa akuntansi yang belum menempuh mata kuliah akuntansi internasional dan telah menempuh mata kuliah akuntansi internasional.

Hidayah (2012) meneliti tentang persepsi mahasiswa tentang IFRS. Dari sudut pandang mahasiswa proses konvergensi IFRS ini terlalu cepat, sehingga mereka merasa kesulitan karena harus mempelajari semua standar keuangan terbaru dari awal lagi. Namun tidak dipungkiri pula, bahwa mempelajari IFRS merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa. Hal itu dikarenakan tuntutan dunia kerja yang semakin keras. Dunia usaha khususnya perusahaan *Go Public* akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mempunyai pengetahuan tentang standar keuangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Agustina (2012) meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen terhadap konvergensi IFRS di Indonesia. Dari pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen mengenai konvergensi IFRS di Indonesia pada tahun 2012.

Utami (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dari jenis perguruan tinggi, status mahasiswa, kecerdasan emosional dan persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap tingkat pemahaman IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perguruan tinggi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pemahaman IFRS. Status mahasiswa berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman IFRS. Kecerdasan emosional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pemahaman IFRS. Persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pemahaman IFRS.

Murad Moqbel dan Aziz Bakay (2010) dalam Utami (2012), melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui apakah civitas akademika dan pelaku profesional di Amerika telah siap untuk menerima IFRS sebagai bahasa umum dalam akuntansi dan pelaporan financial. Hasilnya adalah sebagian besar responden percaya bahwa komparabilitas dan keseragaman pelaporan keuangan termasuk Laporan audit berdasarkan IFRS adalah prinsip-prinsip kunci untuk bergerak menuju penyatuan standar. Konvergensi ke IFRS diharapkan dapat meminimalkan hambatan untuk kompetisi global dalam kaitannya dengan permodalan dan dapat menguntungkan semua pihak termasuk investor.

Penelitian Muchlis (2011) tentang harmonisasi standar akuntansi internasional dan dampak penerapan dari adopsi penuh IFRS terhadap PSAK menghasilkan: konvergensi terhadap IFRS merupakan *milestone* baru dari serangkaian *milestone* yang pernah dicapai oleh Indonesia dan IAI dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi, khususnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Di samping manfaat yang akan diperoleh dalam mengadopsi IFRS, implementasi dalam adopsi IFRS tersebut bukan tanpa masalah, terdapat beberapa kendala yang harus dialami oleh negara-negara yang sedang melakukan adopsi IFRS termasuk Indonesia, begitu pula dampaknya yang berimbas terhadap dunia bisnis dan dunia pendidikan khususnya akuntansi.

Anjasmoro (2010) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui alasan dan ekspektasi sebuah perusahaan melakukan adopsi *International Financial Report Standard* (IFRS), memahami bagaimana proses adopsi dan aplikasi IFRS pada sebuah perusahaan dan mengetahui manfaat serta hambatan

dalam melakukan proses tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan Garuda Airlines melakukan adopsi IFRS bukan karena suatu paksaan dari pemerintah maupun IAI tetapi atas keinginan perusahaan itu sendiri karena GA merasa memerlukan sebuah standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan. Manfaat adopsi IFRS adalah laporan keuangan yang transparan, *comparable*, dan *valuable* sehingga mampu menaikkan nilai perusahaan tersebut di mata publik. Manfaat lain yang diperoleh dari adopsi IFRS pada GA adalah legitimasi dari lingkungan bisnis organisasi ini. Sedangkan hambatan adopsi IFRS adalah kesiapan SDM, kesiapan sistem akuntansi dan pembiayaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Definisi Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Ikhsan dan Ishak (2005:57) dalam Hidayah (2012), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian sehingga berbeda satu dengan yang lainnya.

Definisi persepsi menurut Gibson (1996:134), persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi obyek, orang, dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari obyek, orang, dan simbol tertentu. Dengan kata lain,

persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada obyek tertentu, maka masing-masing obyek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat obyek yang sama.

2.2.2 Pengertian dan Profesi Akuntan

2.2.2.1 Pengertian Akuntan

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).

Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan R.I.

2.2.2.2 Profesi Akuntan

Profesi Akuntan di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan/menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan kepada kliennya di

Indonesia atas dasar pembayaran tertentu. Mereka ini bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan diterbitkan. Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.
- b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI.
- c. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- d. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
- e. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik.

- h. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Ujian Sertifikasi Akuntan Publik

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia” (sebelum tahun 2007 disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.

2. Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Instansi Pajak. Tugas akuntan pemerintah antara lain: (1) Pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan Negara, (2) melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah.

3. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan

4. Akuntan Manajemen

Akuntan manajemen disebut juga sebagai akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai investasi jangka panjang. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

2.2.3 Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi

Standarisasi berbeda dengan harmonisasi. Standarisasi adalah penetapan aturan yang kaku, sempit dan bahkan mungkin penerapan satu standar/aturan tunggal dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, oleh karena itu sulit diimplementasikan secara internasional. Harmonisasi jauh lebih fleksibel dan terbuka, tidak menggunakan pendekatan satu untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan (Choi, 2005:55-56).

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan daya banding informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Secara sederhana harmonisasi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.

Menurut Wiyani (2005) dalam Kusumawardhani (2011), harmonisasi akuntansi dimaksudkan agar standar akuntansi yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar di setiap negara selaras dengan IAS (*International Accounting Standards*) yang ditetapkan oleh IASC. Tidak perlu sama pengaturannya secara teknis, asalkan tidak saling bertentangan maka standar akuntansi nasional dikatakan harmonis dengan IAS. Pada tahun 1980-1990an, harmonisasi adalah kata yang sering disebut, namun pada tahun 1990-saat ini, di kalangan profesi akuntan di dunia menggunakan istilah konvergensi. Konvergen/*Convergen* menurut IASB adalah "*the same word by word in English*".

FASB (*Financial Accounting Standards Board*), dalam laporannya yang berjudul *International Accounting Standard Setting: A Vision for The Future*, meyakini bahwa perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. Tanpa menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standar yang sama untuk seluruh dunia ini sebagai standarisasi, FASB juga tidak

menyatakan secara eksplisit bahwa usaha ini merupakan usaha harmonisasi. FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus (a) memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian, dan (b) membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi *convergent* atau semirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkan adanya standardisasi standar akuntansi namun tidak mengingkari bahwa proses menuju standardisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang lebih terarah menuju standardisasi (Agustina, 2012).

Manfaat konvergensi menurut Paul (2002) dalam Gamayuni (2009) adalah: (1) Informasi keuangan dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang, (3) Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan training kepada karyawan, (4) Meningkatkan pasar modal domestik menuju pasar modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain. Sedangkan manfaat dari adanya suatu standar global: (1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. (2) Investor dapat membuat keputusan lebih baik, (3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan

keputusan mengenai merger dan akuisisi, (4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarakan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

2.2.4 *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama *International Accounting Standar Committee (IASC)*, merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi, 2005:64). IFRS kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara.

Natawidnyana (2008) dalam Utami (2012) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan *International Accounting Standards (IAS)*. IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi

seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

International Financial Reporting Standards mencakup :

1. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001
2. *International Accounting Standards* (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001
3. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) – setelah tahun 2001
4. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) – sebelum tahun 2001.

Menurut Chariri (2009) dalam Agustina (2012), secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Pertama, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut

disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

1. *Full Adoption*

Suatu negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkan IFRS *word by word* ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.

2. *Adopted*

Mengadopsi seluruh IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.

3. *Piecemeal*

Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.

4. *Referenced*

Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.

5. *Not adopted at all*

Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

2.2.5 Sejarah, Perkembangan, dan Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional (IFRS) di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan di Indonesia sedang dalam proses konvergensi dengan IFRS yang dikeluarkan oleh *International Accounting*

Standards Board (IASB). Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi ke depan akan selalu mengacu pada IFRS tersebut. Proses konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia ke IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia bisnis internasional yang sudah lama menganut standar ini. Penerapan IFRS ini sendiri secara internasional dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan (Kusumawardhani, 2011).

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2008) :

1. Di Indonesia selama penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (*Sound Business Practices*) gaya Belanda.
2. Sampai Tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.
3. Tahun 1974 : Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi.
4. Tahun 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar akuntansi.
5. Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (*International Accounting Standards Committee*).

6. Sejak Tahun 1994 : IAI sudah *Committed* mengikuti IASC / IFRS.
7. Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
8. Tahun 2012 : mengadopsi IFRS sepenuhnya.

Dibawah ini disajikan tabel yang menunjukkan ringkasan mengenai sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang telah direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI.

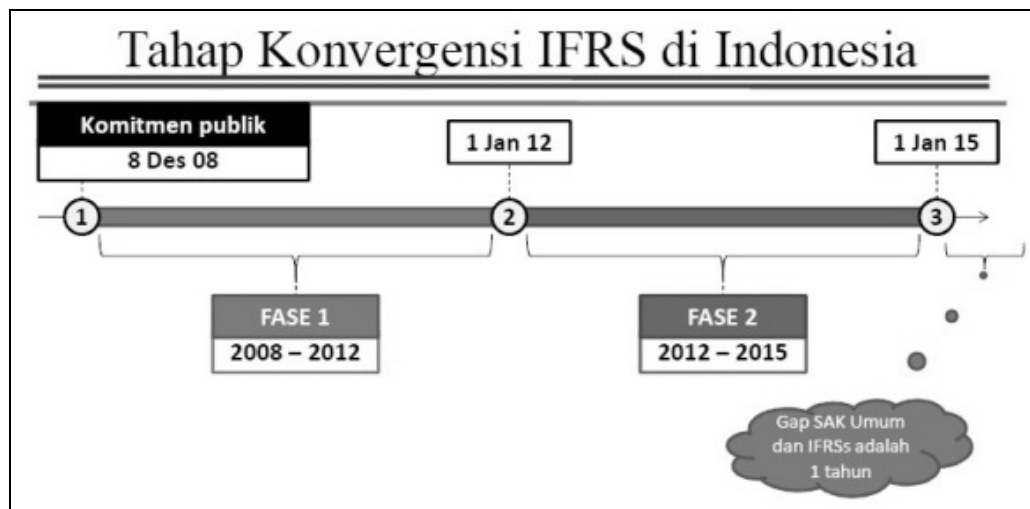
Tabel 2.1
Sasaran Konvergensi PSAK ke IFRS

Tahap Adopsi (2008-2010)	Tahap Persiapan Akhir (2011)	Tahap Implementasi (2012)
<ul style="list-style-type: none"> • Adopsi seluruh IFRS ke PSAK • Persiapan infrastruktur yang diperlukan • Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan • Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap • Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif

Sumber : http://www.academia.edu/7597902/KONVERGENSI_PSAK_KE_IFRS/

Menurut Rosita Uli Sinaga dalam “Workshop 2014 PSAK Update”, status konvergensi IFRS – PSAK tahun 2014 merupakan konvergensi gelombang kedua bagi Indonesia dalam mengadopsi IFRS.

Update Konvergensi IFRS 13 Maret 2014 (Ikatan Akuntan Indonesia)



Sumber : <http://accounting.binus.ac.id/2014/09/01/status-konvergensi-ifrs-psak/>

Gambar 2.1
Tahap Konvergensi IFRS

Pada konvergensi IFRS fase satu (2008-2012), per 1 Desember 2012 DSAK IAI telah menerbitkan: 40 PSAK, 20 ISAK, 11 PPSAK berikut revisi terkait serta 10 PSAK Syariah. DSAK IAI juga menerbitkan PSAK non-IFRS.

Tahun 2012–2015, Indonesia memasuki fase kedua konvergensi IFRS. Di fase ini kedua ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menelurkan banyak PSAK, antara lain PSAK 24 (2013) : Imbalan Kerja yang akan berlaku efektif 1 Januari 2015. Ketua DSAK IAI, Rosita Uli Sinaga mengatakan, ada pertimbangan pada 1 Januari 2015 DSAK IAI bisa mengadopsi IFRS secara penuh. PSAK 24 ini akan berdampak pada keuangan perusahaan yang dikeluarkan untuk pekerjanya (karyawan). PSAK ini mengadopsi pengaturan yang ada dalam IAS 19 : *Employee Benefit* yang disahkan oleh DSAK pada 19 Desember 2013 lalu (Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi Juni 2014, hal:50).

PSAK updates – Konvergensi gelombang kedua

Beberapa PSAK dan ISAK yang disahkan pada tahap konvergensi gelombang kedua, yaitu:

Pada tanggal 12 Juli 2013, DSAK IAI telah mengesahkan :

1. ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan
2. ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
3. ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
4. PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33 (PSAK untuk Industri Pertambangan).

Pada tanggal 19 Desember 2013, DSAK IAI telah mengesahkan :

1. PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri
3. PSAK 15 (2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
4. PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja
5. PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian
6. PSAK 66: Pengaturan Bersama (menggantikan PSAK 11 dan PSAK 12)
7. PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
8. PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar

Pada tanggal 24 April 2014, DSAK IAI telah mengesahkan :

1. PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan
2. PSAK 48 (2014): Penurunan Nilai Aset
3. PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian
4. ISAK 26 (2014): Penilaian Ulang Derivatif Melekat

5. ISAK 25 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
6. PSAK 60 (2014): Instrument Keuangan: Pengungkapan Pengecualian (Per 2014)
 1. IFRS 1 *First Time Adoption of International Financial Reporting Standards* – Menunggu adopsi penuh IFRS
 2. IFRS 9 *Financial Instruments* – Menunggu finalisasi IFRS 9 secara utuh
 3. IAS 41 *Agriculture* – menunggu finalisasi pembahasan IASB atas amademen IAS 41 (estimasi kuartal ketiga 2014).
 4. IFRIC 15 *Agreements for the Construction of Real Estate* – IASB telah menerbitkan IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* (26 Mei 2014) yang akan mencabut IFRIC 15.
 5. IFRIC 21 *Levies* – dalam pembahasan dan akan mengikuti perkembangan penerapan yuridiksi lain. (sumber: <http://accounting.binus.ac.id>)

2.2.6 Manfaat Konvergensi IFRS

Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M. Kurniawan dalam Majalah Akuntansi Indonesia, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.

6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam Gamayuni (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan demikian dapat menarik modal ke dalam perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini.

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal (Gamayuni, 2009).

2.2.7 Tantangan dan Hambatan dalam Proses Konvergensi IFRS

Menurut Rezaec et al (2010) dalam Kusumawardhani (2011), tantangan dan hambatan dalam proses konvergensi dapat berupa budaya, politik, dan hukum. Sedangkan menurut Nobes dan Parker (2002) dalam Gamayuni (2009) rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah: (1) Perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, (2) Kurangnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) Perbedaan sistem politik dan ekonomi di tiap-tiap negara.

Menurut Paul (2002) dalam Gamayuni (2009), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, (3) Perbedaan kepentingan antar perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, (4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Seperti yang dijelaskan dalam Majalah Akuntansi Indonesia Edisi 14 bulan Februari 2009 terdapat berbagai hambatan konvergensi di Indonesia, seperti:

1. Hambatan Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia bersumber dari Belanda (*code law*). Dalam sistem *code law* berbagai aturan diturunkan dari prinsip-prinsip yang bersifat abstrak. Campur tangan pemerintah sangat besar dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip yang bersifat abstrak tersebut. Di Negara-negara yang memiliki sistem hukum *code law*, praktek-praktek akuntansi dan *standard setting* dipengaruhi kondisi politik lebih kuat dibanding Negara-negara yang menganut sistem *common law*. Konvergensi cenderung lebih efektif dalam

negara-negara yang sumber hukumnya *common law* (Ball et al.:2000) dalam Gamayuni (2009).

2. Sistem penegakan Hukum

Kepatuhan atas IFRS dipengaruhi secara signifikan dengan *law enforcement* berbagai aturan dan ketentuan IFRS (Wulandari dan Rahman:2004) dalam Kusumawardhani (2011). *Report On The Observance Of Standards And Codes* (ROSC) di Indonesia tahun 2005 menjelaskan bahwa ketidaktaatan terhadap standar akuntansi dan auditing di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan sanksi atau denda yang relatif ringan. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan oleh lemahnya *legal environment* antara lain tidak adanya undang-undang akuntan publik sehingga tanggung jawab akuntan publik menjadi kurang jelas.

3. Infrastruktur Konvergensi

Salah satu permasalahan besar konvergensi bagi sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah penerapan penilaian dengan nilai wajar (*fair value*). Penerapan penilaian dengan menggunakan nilai wajar (*fair value*) membutuhkan bantuan dari profesi lain selain akuntan. Akuntan tidak bisa menentukan sendiri seberapa besar nilai wajar tersebut. Sehingga diperlukan suatu *appraisal*.

4. Hambatan Kultur

Radebaugh dan Gray (1997) dalam Agustina (2012) menunjukkan bahwa kultur memegang peran penting dalam pembentukan sistem akuntansi suatu negara. Radebaugh dan Gray mengklasifikasikan kultur akuntansi secara

umum dalam 4 nilai yakni *Professionalism vs Statutory Control*, *Uniformity vs Flexibility*, *Conservatism vs Optimism*, dan *Secrecy vs Transparency*. Sistem akuntansi suatu negara dipengaruhi secara signifikan dengan kultur akuntansi. IAS/IFRS mengusung kultur unifrom, kurang konservatif, dan sangat transparan sementara negara-negara Asia pada umumnya cenderung memiliki kultur akuntansi yang cenderung konservatif dan kurang transparan. Berdasarkan penelitian Ding et al (2004) dalam Kusumawardhani (2011), indeks transparansi Indonesia berada dalam posisi yang rendah. Transparansi merupakan permasalahan konvergensi di Asia pada umumnya yang menyebabkan hambatan tersendiri dalam proses konvergensi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam konvergensi IFRS, dapat disimpulkan bahwa dalam proses konvergensi IFRS tidak berjalan mudah. Banyak hambatan yang muncul selama proses konvergensi tersebut, yaitu:

1. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya
2. IFRS yang berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.
3. Kendala bahasa, karena dalam setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali ini tidaklah mudah.
4. Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan.

5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.
6. Support pemerintah terhadap issue konvergensi.

Pada umumnya, ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan konvergensi IFRS. Permasalahan pertama adalah kurang siapnya infrastruktur seperti DSAK sebagai *financial accounting standard setter* di Indonesia. Permasalahan yang kedua adalah kondisi peraturan perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Permasalahan yang ketiga adalah kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia (Kusumawardhani, 2011).

2.3. Hipotesis

IFRS diadopsi sebagai standar akuntansi yang baru maka diperlukan orang-orang yang mengerti tentang ketentuan-ketentuan IFRS, salah satunya adalah akuntan. Saat ini para akuntan yang telah bekerja pada perusahaan-perusahaan besar dan perbankan berlomba-lomba mempelajari IFRS demi mempertahankan karir mereka. Bahkan sudah ada sebagian kecil perusahaan multinasional yang mensyaratkan "*IFRS capability*" pada *job vacancies* yang mereka buka. Ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan mulai membutuhkan akuntan yang memahami IFRS (Utami, 2012).

Faktanya konvergensi IFRS di Indonesia tidak berjalan mudah, berbagai sumber menyebutkan banyak hambatan-hambatan yang muncul selama proses konvergensi IFRS tersebut, seperti: Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap, untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi baru yang harus dipelajari lagi

oleh para akuntan. Selain itu, kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS juga akan sedikit menghambat proses konvergensi ini.

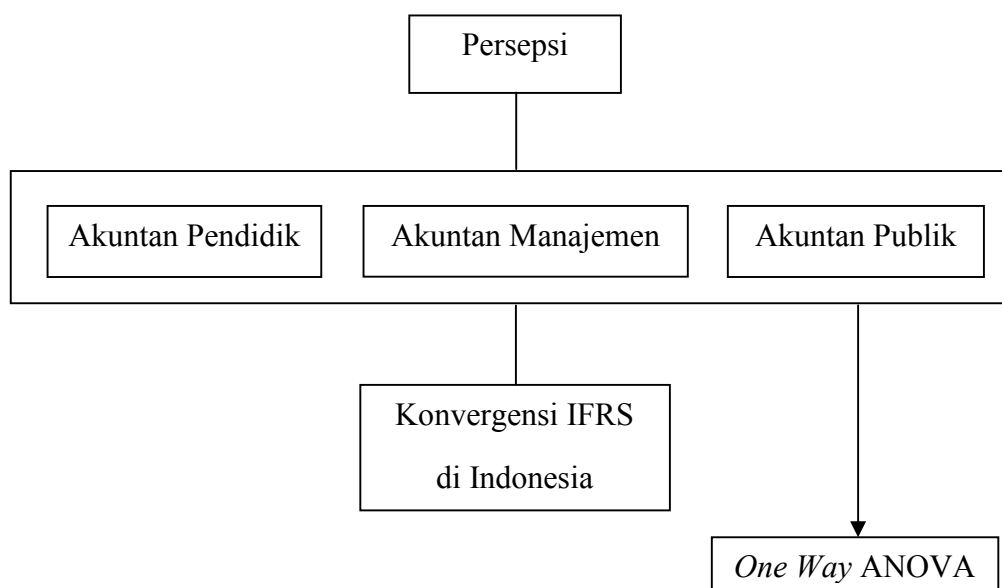
Oleh karena persepsi, sikap dan perilaku masing-masing Akuntan yang bervariasi, sehingga akan sangat menarik untuk menggali persepsi berbagai profesi Akuntan mengenai kesiapannya terkait dengan proses konvergensi IFRS di Indonesia khususnya pada fase kedua ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap konvergensi IFRS fase kedua di Indonesia.

2.4. Rerangka Konseptual

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya disampaikan pemikiran teoritis yang digambarkan dengan suatu kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran sebagai alat untuk menemukan jawaban yang diharapkan, serta model pengujiannya dapat digambar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa persepsi Akuntan Pendidik, persepsi Akuntan Manajemen dan persepsi Akuntan Publik terhadap konvergensi IFRS fase kedua di Indonesia akan dianalisa menggunakan teknik uji *analysis of variance* (ANOVA). *Analysis of variance* atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Sebagai alat statistika parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas dan random sampling (Ghozali, 2001:28).